

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undang

Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Perumahan dan Permukiman di Daerah

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undang

_____. Pasal 1 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

_____. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

_____.Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

B. Buku

Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.

Benyamin Hoessein. Dalam pengantar buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Karya Khairul Muluk. ITS Press. Surabaya. Thn. 2009.

Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media,

Sigit Riyanto, dkk, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

C. Lain-lain

Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia," *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>

Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751>

Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum* 4 no 2 (2019) <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>

Ida Ayu Dyah Permata Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Ketut Sukadana, "Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 109–13, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1620.109-113>.

Hasyim Asyari, "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Study Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 81–96, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p81-96>

Iwan Sulistiyo and Widayati Widayati, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 191–200, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633>.

Jamal Kasim and Dkk, 'Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kerja Di Tinjau Dari Pasal 176 Angka 9 Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Lex Specialis, Volume 1* N.11 (2020)

Nano Tresna, 'MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun', *Mahkamah Konstitusi*

Republik Indonesia, 2021, p. 1 <mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#>. Di akses pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 14:14

R A S Hernawati and J T Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020): 392–408, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.

Sylvia Aryani, "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah," *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 153, <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3392>

Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law", *Jurnal Ius Constituendum* 5, no 1 (2020): 173
<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>

Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), hlm. vi.

Wahidudin Adams, "Fasilitasi Perancangan Peraturan daerah dalam Rangka Kebijakan dan Standarisasi Teknis Bidang Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal legislasi Indonesia* 1, no. 4 (2004)1-12

Putra Pradana Disantara and Dkk, 'Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya *UU Cipta Kerja*', *Law Review*, XX, No 2. November (2021), 20-21 *Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2021, pp. 1–327